

PENGELOLAAN TERMINAL SUDU DI KECAMTAN ALLA KABUPATEN ENREKANG

Zulfitri¹, Musliha Karim², Muhammad Idris³

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisipol Unismuh Makassar

ABSTRACT

The aim of this research is finding out restributor Management of Sudu station in Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. The method was applied in this research is descriptive qualitative with fenomology research type. Data collection techniques was used are interview which has nine informans, observation, and documentation. Data analysis techniques are reduction, data application, and conclusion. Validity of the data used triangulation of resources, time, and techniques. The result shows the redistribution management of Sudu station Kabupaten Enrekang is still under of target, and it makes the income of Kabupaten Enrekang is very low and facilities is still out of completed.

Key Words: *Management, Restribution, Station.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan retribusi terminal Sududi Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan informan Sembilan orang, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data digunakan triangulasi yaitu triangulasi waktu, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan retribusi terminal sudu Kabupaten Enrekang belum optimal dilihat dari realisasi penerimaan retribusi terminal tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga peningkatan terhadap PAD Kabupaten Enrekang sangat rendah dan fasilitas di terminal masih belum lengkap.

Kata Kunci: *pengelolaan. Retribusi, terminal.*

PENDAHULUAN

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum. Keberadaan terminal berperan dalam menentukan tingkat kinerja dari pelayanan angkutan umum dalam suatu wilayah. Berdasarkan PM No. 132 Tahun 2015, penyelenggaraan terminal angkutan umum harus dilengkapi dengan fasilitas didalamnya baik itu fasilitas utama maupun fasilitas penunjang, agar kendaraan yang masuk ke area terminal bisa lebih tertib dan mematuhi rambu-rambu yang telah disediakan.

Kondisi fasilitas utama ataupun penunjang pada terminal pada umumnya sangat tidak layak dan tidak nyaman untuk dikunjungi. Dari beberapa permasalahan yang timbul menyebabkan sistem manajemen pada setiap terminal yang ada semakin menurun sehingga sangat diperlukan tentang adanya pengelolaan terminal. Pengelolaan terminal merupakan salah satu variabel yang berperan dalam pengembangan transportasi, dapat

menunjang aktivitas para pengguna jasa angkutan umum, dan pengelolaan retribusi terminal memiliki potensi besar memberikan masukan pada kas daerah guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang. Pemasukan daerah yang berasal dari PAD yang semakin menurun dari tahun ke tahun menjadi tumpuan yang utama dan dimaksimalkan oleh daerah, sehingga upaya-upaya dalam pemanfaatan kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat terus digali.

Komponen yang mendukung PAD itu adalah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Pengelolaan retribusi terminal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk membiayai pembangunan serta kebutuhan suatu daerah. Retribusi terminal merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang yang bersumber dari retribusi daerah.

Hal ini terdapat dalam Perda Kabupaten Enrekang No.10 Tahun 2011 tentang retribusi izin

terminal. Berdasarkan hasil pra-riset Kabid Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang mengemukakan bahwa penyebab belum mencapai target karena kendaraan tidak mau masuk terminal, dan Fasilitas terminal belum lengkap.

Pengelolaan terhadap retribusi Terminal Sudu Kabupaten Enrekang dinilai belum optimal akibatnya realisasi penerimaan retribusi terminal tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan Pemerintah daerah sehingga sangat perlu adanya pengelolaan yang baik dari pemerintah daerah.

Terry (2009:9) mengemukakan pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti memiliki arti proses perbuatan dan cara mengelola melakukan sesuatu kegiatan dengan mengarahkan orang

lain, dan proses mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Siswanto, (2006:21) pengelolaan merupakan suatu aktifitas yang sistematis yang saling bersusulan agar tercapai tujuan. Pengelolaan dapat diartikan sebagai manajemen, manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan.

G.R.Terry dalam Hasibuan (2006:2) manajemen pengelolaan adalah proses yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Siagian (2005:36) mengatakan bahwa perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan.

Pengorganisasian merupakan proses mengatur dan mengalokasikan tugas-tugas, pekerjaan, wewenang, peran-peran termasuk koordinasi hubungan-hubungan antar bagian baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu struktur

organisasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Semakin jelas dan terpadu tugas-tugas yang dirancang dalam suatu organisasi akan semakin efektif organisasi itu mencapai tujuannya (Silalahi, 2011:184).

Menurut (Siswanto, 2006:75) Pengorganisasian adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kesatuan pekerjaan, penetapan hubungan antar pekerjaan yang efektif diantara merekadan pemberian lingkungan serta fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga mereka bekerja secara efisien.

Penggerakkan (*Actuating*) merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Di dalam manajemen, pengarahan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda.

Pada umumnya pimpinan menginginkan pengarahan kepada bawahan dengan maksud agar mereka bersedia untuk bekerja sebaik mungkin, dan diharapkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip di atas.

Cara-cara pengarahan yang dilakukan dapat berupa, (a) Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik, (b) Perintah merupakan permintaan dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau mengulangi suatu kegiatan tertentu pada keadaan tertentu. Dan, (c) Delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya

Siswanto dan Sastrohadiwiryo, (2003:26) pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh manajemen dengan mempergunakan

dua macam teknik, yaitu : pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya.

Sedangkan, yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Laporan tersebut dapat berbentuk tertulis dan lisan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung itu adalah bahwa para bawahan sering kali hanya melaporkan hal-hal yang positif saja, padahal seorang pimpinan yang baik akan menuntun bawahannya untuk melaporkan hal-hal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.

Kaho (2003:17) Retribusi Daerah adalah pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara ataupun merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat di tunjuk.

Ahmad Yani (2002:56), Jenis Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 10 Tahun 2011 pada pasal 1 ayat 13 adalah “Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyedia fasilitas parkir kendaraan umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal

Syaripuddin (2010:34) mengemukakan bahwa retribusi terminal adalah retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi/badan yang memakai jasa layanan terminal yang menyelenggarakan angkutan orang/ barang dengan kendaraan umum. Retribusi terminal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang keberadaannya cukup bermanfaat bagi setiap kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang

serta perpindahan moda angkutan. Undang-Undang No 34 tahun 2000 disebutkan bahwa PAD merupakan segala sesuatu yang diperoleh pemerintah daerah yang dapat diukur dengan uang karena adanya kewenangan yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Segala sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki potensi yang sangat besar dalam memberikan masukan pada kas daerah.

Menurut UU 32 tahun 2004 pada pasal 157, sumber PAD terdiri dari (a) Hasil pajak daerah, (b) Hasil Retribusi Daerah, (c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan menurut Kaho (2003:143) Sumber Pendapatan Asli

Daerah (PAD) meliputi Pajak daerah, Retribusi daerah, Perusahaan daerah. Dinas daerah, dan Pendapatan daerah lainnya.

Adapun yang menjadi variable pengelolaan meliputi 4 indikator diantaranya adalah Perencanaan yaituperencanaan penentuan target dan perencanaan penentuan fasilitas terminal. Pengorganisasian meliputi Sumber daya manusia dan cara pelaksanaan pemungutan retribusi. Penggerakkan yaitu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan, dan Pengawasan yaitu dengan indikator pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

METODE PENELITIAN

Waktu penelitian ini dilakukan selama dua bulan setelah seminar proposal. Lokasi penelitian dilaksanakan dilaksanakan di Dinas Perhubungan, Infokom Kabupaten Enrekang dan di Terminal Sudu Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu pendekatan yang diarahkan

untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan fenomena, fakta-atau kejadian secara sistematis dan akurat sedangkan tipe penelitian ini adalah Fenomenologi yang menjelaskan suatu fakta atau realita dengan informan penelitian sebanyak sembilan orang.

Teknik pengumpulan data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi ialah metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mengadakan komunikasi secara langsung dengan sumber informasi tentang kondisi penelitian.

Wawancara metode yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan dengan para informan untuk memperoleh data, baik dengan menggunakan daftar pertanyaan ataupun percakapan bebas yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data, yaitu data sekunder dan data primer. Data tersebut dianalisis secara deskriptif

di interpretasi pada informan dengan melakukan wawancara informan kemudian mengecek kembali data tersebut untuk memahami secara mendalam serta teori-teori yang sesuai dengan data tersebut yang dikumpulkan agar dapat menghasilkan penelitian bermutu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Retribusi Terminal untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Infokom Kabupaten Enrekang khususnya Seksi Terminal selaku pelaksana teknis yang melakukan tugas di bidang Pengelolaan Terminal. Dengan ini peneliti akan menjelaskan tiga indikator yang terdapat didalam pengelolaan retribusi terminal yang meliputi (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penggerakkan dan (d) pengawasan.

Perencanaan adalah pemilihan dan pemutusan sekumpulan kegiatan yang harus dilakukan. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan oleh siapa. Pada

prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka perencanaan harus mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dan kondisi di waktu sekarang yaitu saat rencana itu dibuat untuk dilaksanakan. Adanya suatu perencanaan diharapkan sumberdaya-sumberdaya akan lebih efektif didalam pemanfaatannya.

Menelaah mengenai perencanaan yang dilakukan oleh Seksi Terminal selakupelaksana teknis yang diberikan kewenangan oleh Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang dalam bidang pengelolaan Terminal, maka terdapat dua indikator meliputi (a) perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal dan (b) perencanaan penentuan fasilitas terminal.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penjabarannya sebagai berikut. Pengelolaan retribusi terminal tidak lepas dari perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal karena merupakan suatu hal yang penting dalam peningkatan realisasi penerimaan retribusi terminal. Perencanaan penentuan

target anggaran senantiasa dilakukan tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki terminal. Sehingga hampir setiap tahunnya realisasi retribusi terminal tidak pernah mencapai target.

Belum tercapainya target penerimaan ini memunculkan banyak spekulasi. Diantaranya soal lemahnya prediksi potensi penerimaan atau tingginya target yang ditetapkan Pemda Kabupaten Enrekang. Jadi untuk penetapan target harusnya disesuaikan dengan potensi yang ada khususnya pada jumlah angkutan yang ada.

Perencanaan didalam menentukan target anggaran retribusi terminal dilakukan musyawarah oleh pihak-pihak yang berwenang antara lain kepala dinas Perhubungan, Infokom, seksi terminal, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) dan DPRD Kabupaten Enrekang kemudian setelah mencapai kesepakatan barulah target yang disetujui direalisasikan. Penentuan target anggaran senantiasa dilakukan tidak didasarkan pada potensi yang dimiliki terminal. Sehingga hampir setiap tahunnya realisasi retribusi terminal tidak pernah mencapai target. Jadi, untuk

penetapan target harusnya disesuaikan dengan potensi yang ada, Khususnya pada jumlah angkutan yang ada. Selain itu, penentuan target anggaran berdasarkan pada realisasi yang dicapai dari tahun sebelumnya sehingga penentuan target selalu berubah-ubah.

Mengenai data tentang potensi sebenarnya yang tidak akurat menyebabkan realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Selain itu, hal lain yang menyebabkan sehingga realisasi penerimaan tidak mencapai target yaitu karena para petugas pemungut retribusi terminal kesulitan dalam mendata setiap masyarakat (pengguna jasa) dan masih banyak kendaraan yang tidak mau masuk keterminal.

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat realisasi penerimaan retribusi terminal Sudu mulai tahun 2014-2016 dilihat bahwa terjadi penurunan realisasi penerimaan dari tahun ketahun. Tahun 2014 Realisasi penerimaan yang melebihi target yaitu 7.050.000 atau 141 persen dari target anggaran yang ditetapkan. Di tahun 2015 realisasi penerimaan menurun yaitu 6.544.00 atau 81,8persen dari target anggaran. Dan

pada tahun 2016 juga mengalami penurunan yaitu 5.304.000 atau 66.3 persen dari target yang telah ditetapkan dan hal ini realisasi tahun 2015 dan 2016 tidak mencapai target anggaran retribusi. Perencanaan penentuan fasilitas terminal bahwa pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyediakan fasilitas dalam terminal agar masyarakat merasa nyaman.

Pemerintah dinas terkait sudah berupaya mengoptimalkan dalam perbaikan fasilitas terminal seperti perbaikan jalan namun, terkendala dalam anggaran, oleh karena itu, fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat dalam terminal masih kurang lengkap salah satunya fasilitas peribadatan (Musholla), papan rambu lalu lintas, dan lain-lain sehingga, masih banyak masyarakat yang malas masuk kelokasi terminal. Indikator kedua yaitu mengenai pengorganisasian. Istilah organisasi yang didefinisikan secara statis diartikan sebagai suatu gambaran secara skematis tentang bagian-bagian tugas dan tanggung jawab dan hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau suatu lembaga sedangkan secara dinamis diartikan sebagai suatu

proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, pembatasan tugas-tugas atau tanggungjawab serta wewenang dan penetapan hubungan antara unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya-sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Pembagian kerja adalah perincian tugas pekerjaan agar setiap individu pada organisasi bertanggung jawab dalam melaksanakan sekumpulan kegiatan.

Kedua aspek ini merupakan dasar proses pengorganisasian suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif karena hasil yang diharapkan dalam suatu pengorganisasian adalah agar dapat menggerakkan pegawai/karyawan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan seperti (a) sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, (b) cara pelaksanaan pemungutan retribusi. Kedua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam melaksanakan pemungutan retribusi terminal. Unsur manusia merupakan unsur yang paling mendasar dan memegang peranan penting dalam pengorganisasian.

Kualitas pegawai dalam melakukan tugasnya seyogianya harus menguasai apa yang dikerjakannya agar tujuan dari pelaksanaan tugasnya dapat dikerjakan dengan baik dan secara kuantitas, semestinya dalam suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Sumber daya manusia yang digunakan yaitu Jumlah pegawai/kolektor yang melaksanakan

pemungutan retribusi di terminal Sudu sudah sangat seimbang dengan wajib retribusi yang ada di terminal. Dengan demikian pemungutan retribusi di terminal Sudu bisa berjalan dengan efektif dan efisien. pemungutan retribusi dalam pemungutan retribusi dengan memberikan karcis secara langsung kepada masyarakat (pengguna jasa).

Kolektor yang ditugaskan di terminal Sudu berjumlah 10 orang yang kemudian dibagi tugas yaitu bagian sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil truk. Kolektor pemungutan retribusi bagian sepeda motor lebih banyak dibandingkan dengan kolektor di bagian mobil. Dan lokasi parkir motor dan mobil pun berbeda.

Pelaksanaan pemungutan retribusi terminal Sudu di Kabupaten Enrekang dilakukan hari senin, selasa, kamis dan hari jumat. Pelaksanaan dan pembayaran retribusi terminal yang dilakukan oleh para kolektor cukup baik karena para kolektor langsung mendatangi para pengguna jasa dan memberikan langsung karcis sehingga para pengguna jasa terminal cukup mudah dalam membayar tariff retribusi. Aparat terminal telah melaksanakan

pemungutan retribusi sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan yaitu PERBUP Kab. Enrekang No.7 Tahun 2016. Kolektor pemungutan retribusi dalam pemungutan retribusi dengan memberikan karcis secara langsung kepada masyarakat (pengguna jasa). Indikator ketiga yaitu penggerakkan (*actuating*) artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif.

Penggerakkan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Di dalam manajemen, penggerakkan ini bersifat sangat kompleks karena disamping menyangkut manusia juga menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri.

Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda. Adapun indikator penggerakkan meliputi dua hal yaitu (a) pemberian motivasi kepada para petugas

terminal, dan (b) sistem penggajian kepada para petugas terminal.

Pemberian motivasi tidak terlepas dari kebutuhan individu itu sendiri dan berbagai fakta internal yang membuat seseorang puas. Pemberian motivasi para pegawai terminal dapat bertujuan untuk mendorong gairah dan semangat kerja pegawai, meningkatkan produktivitas kerja dan juga meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. Mengenai pemberian motivasi terhadap petugas terminal sudu Kabupaten Enrekang telah dilakukan oleh pemerintah.

Komunikasi yang terjalin baik antara para petugas dengan para pihak dinas yang baik serta pengarahan yang diberikan bersifat positif menjadi motivasi bagi para petugas terminal. pengarahan ini masih harus ditambah insentitas waktunya karna mengingat masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para kolektor seperti keterlambatan jam kerja yang sangat berpengaruh pada jumlah penerimaan retribusi yang dapat terealisasi.

Bentuk pergerakan yang lain bisa juga di lihat dari bagaimana

sistem penggajian para kolektor/ pemungut retribusi terminal Sudu dan adakah reword yang di berikan jika target yang direncanakan bisa tercapai. Pemerintah tidak memberikan penghargaan khusus kepada kolektor yang kerja dengan baik, tapi terkadang diberikan oleh kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi sebagai motivasi agar para kolektor dapat bekerja lebih baik lagi. Sistem penggajian para kolektor yang kadang-kadang terlambat membuat mereka tidak semangat dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan hal ini karena ini sangat berpengaruh pada kinerja para kolektor.

Fungsi manajemen yang diangkat penulis merupakan fungsi manajemen yang ke empat yaitu pengawasan (*controlling*) Fungsi tersebut menyangkut semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer atau pemimpin dalam upayanya memastikan bahwa hasil actual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan dimaksudkan disini yaitu proses pemantauan yang dilakukan oleh tim pemungut retribusi terminal.

Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi merupakan hal yang sangat urgen. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan.

Pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir. Demikian halnya dalam pemungutan retribusi terminal Sudu di Kabupaten Enrekang yang dilakukan oleh pemerintah Daerah menghindari menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi terminal Sudu tanpa dilakukan pengawasan maka, akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi di terminal Sudu Kab. Enrekang. Dengan

pengawasan yang baik maka kecenderungan akan timbulnya kesalahan yang kurang mendukung keberhasilan dalam pemungutan retribusi terminal dapat ditekan seminimal mungkin.

Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Enrekang melakukan pengawasan meliputi (a) pengawasan langsung dan (b) pengawasan tidak langsung kepada petugas terminal yang melakukan pemungutan retribusi terminal kepada masyarakat (pengguna jasa). Pengawasan langsung dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Informasi dan komunikasi Kabupaten Enrekang dan kepala seksi terminal yang langsung mengadakan peninjauan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan di lapangan yang berhubungan dengan pemungutan retribusi terminal Sudu di Kabupaten Enrekang.

Para petugas dan para sopir yang melakukan kesalahan, hanya diberikan pengarahan agar tidak mengulangi kesalahannya, dan lebih bertanggungjawab pada tugas yang diberikan, karena dalam perbup yang dipedomani tidak tercantum sanksi

yang tegas. Namun para pemerintah daerah tidak segan-segan memberikan sanksi yang tegas pada kolektor yang selalu mengulangi kelalaiannya.

Setiap hari pasar yakni hari selasa dan hari jum'at, para pengawas langsung kelapangan untuk mengecek kolektor, apakah sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur serta memastikan bahwa apakah semua wajib retribusi diterminal sudah membayar kewajibannya. Pengawasan langsung dilakukan Koordinator Pemungutan Retribusi Terminal sebagai penanggung jawab penerimaan retribusi terminal setiap turun kelapangan mengawasi para personilnya dalam melaksanakan pemungutan, untuk menghindari terjadinya penyimpangan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan sebagainya yang dapat menghambat pencapaian penerimaan retribusi terminal di Kabupaten Enrekang.

Dinas terkait melakukan pengawasan kepada kolektor pemungut retribusi setiap hari selasa dan jum'at, masyarakat dan petugas yang melakukan kesalahan dan penyimpangan hanya diberikan

sanksi yaitu pengarahan dan peringatan saja karena dalam PERBUP tidak dicantumkan sanksi yang tegas.

Penyimpangan sering terjadi karena pengawasan yang dilakukan belum efektif sehingga para petugas dan sopir mengulangi kesalahannya oleh karena itu, ketegasan pihak pengawas harus ditingkatkan agar petugas dan masyarakat pengguna jasa terminal dalam proses pemungutan retribusi terminal tidak selalu melakukan pelanggaran.

Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan meminta laporan penerimaan retribusi Kabid Keuangan perbulannya dan melakukan evaluasi pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi terminal dan juga melakukan pengawasan terhadap benda berharga (karcis) perbulannya melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya. Dinas terkait melakukan pengawasan tidak langsung dengan meminta laporan penerimaan retribusi perbulannya

kemudian dievaluasi untuk mengetahui kekurangan dalam proses pemungutan retribusi dan dalam laporan penerimaan pemungutan retribusi dilakukan dengan menghitung jumlah karcis yang keluar.

Kordinator kolektor melaporkan hasil pemungutan ke kepala seksi terminal kemudian diserahkan ke bendahara penerimaan retribusi. Penyetoran atau pelaporan retribusi terminal dilakukan setiap akhir bulan kemudian diolah oleh pegawai Dinas yang berwenang. Laporan penerimaan retribusi dimasukkan di laporan mingguan oleh kordinator kolektor kemudian disetor tiap akhir bulan ke pihak dinas untuk dikelola.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengelolaan terminal sudu di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa Pada indikator perencanaan Pada indikator perencanaan yang dibuat untuk meningkatkan realisasi penerimaan retribusi terminal yaitu (a) Perencanaan penentuan target anggaran retribusi terminal masih

belum efektif karena tidak di dukung dengan data-data yang akurat mengenai potensi yang di miliki oleh terminal khususnya dengan menyesuaikan jumlah kendaraan yang masuk dalam wajib retribusi. (b) Perencanaan penentuan fasilitas terminal dalam hal ini pemerintah telah berupaya meningkatkan fasilitas dalam terminal namun, terkendala hal anggaran sehingga sampai saat ini fasilitas Terminal Sudu masih kurang lengkap.

Pengorganisasian meliputi (a) Sumber daya manusia dalam hal ini para petugas terminal yang sudah seimbang dengan jumlah pekerjaan dan wajib retribusi yang ada di terminal. (b) Cara pelaksanaan pemungutan retribusi terminal yang dilakukan oleh para kolektor yang berjalan secara efektif dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Penggerakan dalam hal ini meliputi (a) Pemberian motivasi kepada para petugas terminal yaitu terjalannya komunikasi yang baik antara para petugas dengan pihak dinas dan pemberian pengarahan yang bersifat positif (b) sistem penggajian kepada para petugas terminal penggajian para kolektor

yang tidak tepat waktu membuat kinerja para kolektor tidak efektif.

Pengawasan yang dilakukan oleh atasan dalam hal ini meliputi (a) Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu turun langsung ke lapangan mengawasi para petugas dalam pemungutan retribusi namun dalam hal ini hasil pengawasannya masih kurang optimal karena pengawasan dilakukan tidak rutin setiap hari melainkan hanya dua kali satu minggu, (b) Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan berdasarkan laporan penerimaan retribusi mingguan yang diserahkan para kordinator kolektor setiap akhir bulan kemudian di evaluasi setiap tahunnya oleh pihak dinas yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Bumi Aksara.
- Halim, Abdul, 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hasibuan, S.P. Malayu, 2006. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indonesia. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Riwu Kaho, Josef. 2003. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sastrohadiwiryono, Siswanto., 2003. *Manajemen Tenaga Kerja*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Siagian, P.Sondang, 2005. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber, 2011. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siswanto, 2005/2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syaripuddin. 2010. *Pengelolaan Retribusi Terminal di Kabupaten Bantaeng*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Terry R.George & Leslie W. Rue, 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Penerjemah G.A Ticolu. Jakarta: Bumi Akasara. Judul asli *Principles of management*. 1992.Dow Jones-Irwin.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Arsip 2016 Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Enrekang.

Laporan *Realisasi Penerimaan retribusi Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2016.*

Peraturan Bupati No 7 Tahun 2016 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Terminal Dan Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor Pm 132 Tahun 2015 Tentang *Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.*

Perda Kabupaten Enrekang No. 10 Tahun 2011 *Tentang Retribusi Izin Terminal.*

UU 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah.*